

**PENGELOLAAN ALOKASI DANA DESA (ADD) DI DESA
BANGKAL KECAMATAN KOTA, KABUPATEN SUMENEP.**

Artikel Skripsi
Program Studi : Manajemen



Oleh :

Eni santi

715.2.1.1761

Program Studi manajemen

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

UNIVERSITAS WIRARAJA

2019

**PENGELOLAAN ALOKASI DANA DESA (ADD) DI DESA
BANGKAL KECAMATAN KOTA, KABUPATEN SUMENEP.**

Artikel Skripsi
Program Studi : Manajemen

Diajukan Oleh :

Eni Santi

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

UNIVERSITAS WIRARAJA

2019

Telah Disetujui

Dosen Pembimbing

Pada Tanggal 20 Agustus 2019



Very Andrianingsih, SE., MM
NIDN : 0728019003

**HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai sivitas akademik Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas
Wiraraja, saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Eni Santi
NPM : 715.2.1.1761
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis
Program Studi : Manajemen
Jenis Karya : Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Hak **Bebas Royalti Noneklusif (Non-exclusive Royalty-Free Right)** atas karya ilmiah saya yang berjudul:

Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) Di Desa Bangkal Kecamatan Kota, Kabupaten Sumenep

Beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Noneklusif ini Fakultas Ekonomi dan Bisnis berhak menyimpan, mengalih media/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (database), merawat, dan memublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Sumenep, 26 Agustus 2019

Yang membuat pernyataan,



ENI SANTI

PENGELOLAAN ALOKASI DANA DESA (ADD) DI DESA BANGKAL KECAMATAN KOTA, KABUPATEN SUMENEP.

**Eni Santi
Very Andrianingsih**

PROGRAM STUDI MANAJEMEN FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS WIRARAJA SUMENEP

Eni460460@gmail.com
veryandrianingsih@wiraraja.ic.id

ABSTRAK

Penelitian ini berjudul tentang Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Bangkal Kecamatan Kota Kabupaten sumenep. Yang bertujuan untuk mengkaji dan menganalisis penggunaan dana yang bersumber dari Dana Alokasi Dana Desa. Dan untuk mengetahui apa saja yang yang menjadi kendala dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa tersebut. Penelitian ini dilakukan pada Desa Bangkal Kecamatan Kota Kabupaten Sumenep. Informan dalam penelitian ini adalah: kepala desa, bendahara desa, sekretaris desa dan masyarakat. Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif yang dilakukan dengan cara mempersiapkan atau mengumpulkan dan menganalisis data sehingga peneliti mendapat gambaran jelas mengenai pengelolaan alokasi dana desa di desa Bangkal kecamatan kota, kabupaten Sumenep. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa pengelolaan alokasi dana desa di Desa Bangkal Kecamatan Kota Kabupaten sumenep. Yang melalui lima tahapan yaitu: perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban. Dimana tahapan tersebut dilakukan dalam pelaksanaan pengelolaan lokasi dana desa di desa bangkal kecamatan kotaka bupaten sumenep dari 5 tahapan tersebut.

Kata Kunci: Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD)

ABSTRACT

This research is entitled about Management of Village Fund Allocation in Bangkal Village, District of Sumenep Regency. Which aims to study and analyze the use of funds sourced from the Village Fund Allocation Fund. and to find out what are the obstacles in managing the Village Fund Allocation. This research was conducted in Bangkal Village, District of Sumenep Regency. Informants in this study were: village head, village treasurer, village secretary and community. This type of research is qualitative research carried out by preparing or collecting and analyzing data so that researchers get a clear picture of the management of village fund allocations in the village of Bangkal, the sub-district of Sumenep. The results of this study show that the management of village fund allocation in Bangkal Village, Sumenep District District. Which goes

through five stages, namely: planning, implementation, administration, reporting, and accountability. Where the stage is carried out in the implementation of management of village fund allocation in Bangkal village, sub-district of regency, sumenep of these 5 stages

Keywords: *Village Fund Allocation Management (ADD)*

PENDAHULUAN

Kesuksesan infrastruktur Indonesia dimulai dari pembangunan ditingkat yang paling rendah adalah pembangunan desa. Tetapi untuk kegiatan pembangunan Indonesia begitu banyak banyak permasalahan inti pembangunan salah satunya yaitu ketimpangan pembangunan perekonomian antara desa dan kota di Indonesia.

Pemerintah desa merupakan lembaga susunan kelembagaan pemerintah Indonesia yang perlu dibangun dan diberdayakan. Karena desa berperan penting dalam setiap proses kebijakan serata menjadi sangat penting dalam pemerataan pembangunan di Indonesia, hal ini menjadi sinkron dengan konsep pembangunan pemerintah yaitu lebih fokus pada pembangunan dengan pemberdayaan rakyat dan perbaikan perekonomian masyarakat. Pembangunan dengan training dan pengembangan pendapatan rakyat sangat baik untuk meningkatkan kemakmuran masyarakat desa, yang pertama dengan memunculkan potensi masyarakat melalui pemberdayaan.

Untuk itu dengan adanya (ADD) maka setiap penduduk terutama Desa Bangkal Kecamatan Kota Sumenep sudah banyak yang merasakan dampak positifnya, salah satunya yaitu untuk pembangunan infrastruktur dan program-program kerja lainnya, seperti program kerja dalam pemberdayaan masyarakat. Agar masyarakat dapat ikut merasakan dampak apa yang telah diberikan pemerintah pusat telah tersampaikan. Desa Bangkal Kecamatan Kota Sumenep terbagi atas tingkatan kelas ekonomi yang berbeda, seperti masyarakat dengan ekonomi kelas menengah keatas, masyarakat kelas menengah dan masyarakat ekonomi kelas menengah kebawah, masyarakat dengan ekonomi kelas menengah keatas dan kelas menengah didominasi oleh masyarakat yang bermata pencaharian sebagai Pegawai Negeri Sipil, Guru,

wirausaha serta wiraswasta. Sedangkan masyarakat dengan kelas ekonomi menengah kebawah merupakan wilayah dengan masyarakat yang memiliki tingkat ekonomi kelas menengah kebawah didominasi oleh masyarakat yang mempunyai mata pencaharian sebagai petani, buruh dan pedagang di pasar, mengingat Desa Bangkal mempunyai sebuah pasar yang sekarang dalam tahap renovasi untuk di jadikan pasar moderen walaupun tahap renovasi tersebut tidak termasuk dalam program kerja deesa, setidaknya akan menambah mata pencaharian msyarakat terutama warga Desa Bangkal.

Pemerintah desa merupakan lembaga susunan kelembagaan pemerintah indonesia yang perlu di bangun dan di berdayakan. Karena desa berperan penting dalam setiap proses kebijakan serata menjadi sangat penting dalam pemerataan pembangunan di indonesia, hal ini menjadi sinkron dengan konsep pembangunan pemerintah yaitu lebih fokus pada pembangunan dengan pemberdayakan rakyat dan perbaikan perekonomian masyarakat. Pembangunan dengan training dan pengembangan pendapatan rakyat sangat baik untuk meningkatkan kemakmuran masyarakat desa, yang pertama dengan memunculkan potensi msyarakat melalui pemberdayaan.

Sementara dampak adanya ADD bagi desa antara lain: Desa dapat memperirit biaya pembangunan, desa dapat mengolah sendiri proyek yang ada. Setiap desa mendapatkan kesetraaan pembangunan sehingga lebih berkontribusi terhadap pelayanan kepada masyarakat desa. Desa memperoleh kepastian biaya untuk belanja operasional pemerintahan desa. Desa dapat mengendalikan permasalahan desa secara tepat tanpa harus menunggu lama datangnya program dari Pemerintah Daerah Kabupaten/kota; Desa tidak lagi hanya tergantung pada swadaya masyarakat dalam mengelola persoalan pemerintahan, pembangunan serta sosial kemasyarakatan desa dapat memajukan terwujudnya demokrasi di desa Dapat mendorong terciptanya pengawasan langsung dari masyarakat. Desa juga menjadi sebuah ukuran bagi negara ketika kesejahteraan masarakat baik dari aspek pendidikan, kesehatan, sosial, ekonomi dan infrastruktur dan lain sebagainya itu baik maka pemeritah juga akan merasakan dampak tersebut. Tetapi ketika tidak

ada kesejahteraan di suatu desa maka pemerintah di katakan gagal dalam memberikan otonominya.

Salahsatunya adalah jalan yang memadai, tingkat pekerjaan yang diperoleh masyarakat jauh lebih banyak bahkan masyarakat yang mempunyai usaha mendapat bantuan dari pemerintahan desa untuk menunjang usahanya seperti pengusaha catring yang mendapat bantuan termos, wajan, kompor dan lain sebagainya. Dan juga pengusaha penjahit yang juga mendapat bantuan mesin jahit dan peralatan untuk menjahit, namun untuk pemberdayaannya sendiri masih mengalami ketidak seimbangan antara pemberdayaan masyarakat dengan pembangunan infrastruktur, karena alokasi dana desanya sendiri masih di dominasi oleh pembangunan infrasktur.maupun non-fisik. Hasil akhir yang diharapkan dengan adanya sumber ADD yaitu terwujudnya Pembangunan macam bidang, baik itu fisik maupun Pembangunan non-fisik atau program yang telah ada. Pembangunan fisik adalah suatu fasilitas bagi rakyat desa seperti rumah jalan, rumah peribadahan, puskesmas, posyandu, dan sebagainya. Selain untuk Pembangunan itu, juga ada pelatihan SDM untuk rakyat desa tentang pelatihan keterampilan mendisain baju, karang taruna, ataupun penyuluhan mengenai berbagai masalah yang dianggap pokok seperti penyuluhan KB , penyuluhan bahaya merokok dan narkoba,maupun pembangunan non fisik lainnya.

Masyarakat juga menjadi hal penting di pemerintahan desa karena masyarakat sangat di dibutuhkan kontribusinya untuk menyukseskan program-program atau kebijakan yang di buat oleh pemerintah desa, misalkan dalam pembangunan infrastruktur, seperti proyek jalan yang membutuhkan kontribusi masyarakat untuk menyelesaikan program tersebut yaitu dengan bekerja. Peningkatan warga yang di harapkan yaitu baik berbentuk pemberian kompensasi, peralatan bahkan training yang diberikan kepada rakyat yang membutuhkan. Dengan adanya (ADD), maka ada banyak sekali perubahan yang terjadi di Desa tersebut khususnya di Desa Bangkal ini, diantaranya adalah infrastruktur yang mudah di jangkau, tingkat pekerjaan yang diperoleh

masyarakat jauh lebih baik walaupun masih belum merata secara keseluruhan, bahkan masyarakat yang mempunyai usaha mendapat bantuan dari pemerintahan desa untuk menunjang usahanya seperti pengusaha catering yang mendapat bantuan termos, wajan, kompor dan lain sebagainya. Dan juga pengusaha penjahit yang juga mendapat bantuan mesin jahit dan peralatan untuk menjahit, namun untuk pemberdayaannya sendiri masih mengalami ketidak seimbangan antara pemberdayaan masyarakat dengan pembangunan infrastruktur, karena alokasi dana desanya sendiri masih di dominasi oleh pembangunan infrasktur.

untuk pengelolaannya sendiri dana alokasi dana desa (ADD) bahwa untuk pemberdayaan masyarakat di desa bangkal kecamatan kota sumenep sudah terlaksana. Namun ntuk permasalahannya sendiri di objek penelitian saya yaitu adanya ketidak seimbangan antara program kerja untuk program pemberdayaan masyarakat dengan program kerja di bidang infrastruktur karena anggaran dana desa lebih bannyak di anggaran untu pembangunan infrastruktur namun, untuk program pemberdayaannya itu sendiri masih belum merata karena hanya sebagian yang mendapat pelatihan untuk pemberdayaan sekaligus bantuan alat usaha tersebut. Sebenarnya masih banyak masyarakat yang tidak mendapatkan bantuan alat usaha dan juga pelatihannya. Serta megenai transparansi juga perlu di tingkatkan agar masyarakat juga mengetahui dikelola untukapa saja APBDes tersebut, terutama (ADD) yang sesuai dengan judul yang saya angkat

Tinjauan Pustaka

Alokasi Dana Desa (ADD)

ADD ini adalah alokasi dana desa yaitu anggaran keuangan yang diberikan pemerintah kepada desa. Sumber ADD ini berasal dari bagi hasil pajak daerah serta dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh kabupaten. Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri no.37 tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa di dalam pasal 18, dijelaskan bahwa alokasi dana desa berasal dari APBD Kabupaten/ kota yang bersumber

dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh Pemerintah Kabupaten / Kota untuk desa paling sedikit 10 % (sepuluh persen). Supaya setiap kegiatan yang dibiayai mencapai sasarannya yang sesuai dengan kepentingan dan harapan masyarakat di desa bersangkutan, maka dalam proses pengelolaan Alokasi Dana Desa ini harus dipenuhi beberapa prinsip diantaranya adalah :

- a. Setiap kegiatan yang pendanaannya diambil dari Alokasi Dana Desa harus melalui perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi secara terbuka dengan prinsip : dari, oleh dan untuk masyarakat.
- b. Seluruh kegiatan dan penggunaan Alokasi Dana desa harus dapat dipertanggung jawabkan secara administrasi, teknis dan hukum
- c. Jenis kegiatan yang akan dibiayai melalui alokasi dana desa diharapkan mampu untuk meningkatkan ketersediaan sarana , pelayanan masyarakat berupa pemenuhan kebutuhan dasar, penguatan kelembagaan desa dan kegiatan lainnya yang dibutuhkan masyarakat desa dan mendesak untuk dipenuhi. Pengambilan keputusan untuk menentukan setiap jenis kegiatan yang dibiayai dengan alokasi dana desa ini harus dilakukan melalui jalan musyawarah dan mufakat
- d. Alokasi dana desa harus dicatat didalam anggaran pendapatan dan Belanja Desa melalui proses penganggaran yang sesuai mekanisme. Menurut Kementerian.Keuangan(2015) penyediaan ADD bertujuan untuk “meningkatkan kesejahteraan dan pemerataan pembangunan desa melalui peningkatan pelayanan publik di desa, memajukan perekonomian desa, mengatasi kesenjangan pembangunan antar desa serta memperkuat masyarakat desa sebagai subjek dari pembangunan. ADD diperuntukkan bagi desa dan desa adat yang ditransfer melalui APBD kabupaten/ kota dan digunakan untuk membiayai :
 1. Penyelenggaraan pemerintahan desa
 2. Pembangunan di desa
 3. Pemberdayaan masyarakat desa

Alokasi Dana Desa (ADD) adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar desa untuk mendanai kebutuhan desa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan serta pelayanan masyarakat. Alokasi Dana Desa (ADD) merupakan perolehan bagian Keuangan Desa dari kabupaten yang penyalurannya melalui kas Desa.

pengelolaan keuangan desa merupakan upaya untuk mendukung penyelenggaraan pemerintah desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa dan pemberdayaan desa. Pengelolaan keuangan desa ialah seluruh kegiatan yang meliputi:

1. Perencanaan
2. Pelaksanaan
3. Penatausahaan
4. Pelaporan
5. pertanggungjawaban

Metode Penelitian

Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini merupakan penelitian pendekatan kualitatif yaitu dilakukan dengan cara mempersiapkan atau mengumpulkan dan menganalisis data sehingga peneliti dapat gambaran jelas mengenai pengelolaan (ADD) di desa Bangkal Kecamatan Kota, kabupaten Sumenep.

Tempat dan Waktu Penelitian

Lokasi dalam penelitian ini adalah Balai Desa Bangkal Kecamatan Kota, Kabupaten Sumenep. Waktu penelitian ini akan di lakukan selama 5 bulan.

Informan

1. Informan kunci : Pemerintah Desa Bangkal kecamatan kota Sumenep (Bendahara Desa dan Sekretaris Desa)

2. Informan pendukung : Masyarakat Desa Bangkal kecamatan kota, Kabupaten Sumenep (ada 5 orang, dan yang menjadi perwakilan hanya 2 orang)

3. Informan utama : kepala desa Desa Bangkal kecamatan kota, Kabupaten Sumenep

Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut:

1. Observasi

sebagai teknik pengumpulan data mempunyai ciri yang jelas bila dibandingkan dengan teknik yang lainnya, observasi tidak terbatas pada orang, tetapi juga pada objek yang lain. Hal ini untuk mengetahui secara pasti bagaimana cara pengelolaan dana desa yang diterapkan di Desa Bangkal Kecamatan Kota Sumenep

2. Metode Wawancara

Penulis mengumpulkan data dengan cara bermonikasi secara langsung dengan kepala desa, sekretaris desa, bendahara desa, dan sejumlah lapisan masyarakat yang berhubungan erat dengan masalah yang diteliti agar mendapatkan data yang akurat berupa laporan keuangan desa dan wawancara.

3. Dokumentasi

penulis menggunakan data melalui dokumen yang ada pada Desa Bangkal Kecamatan Kota Sumenep, berupa laporan keuangan Desa, dan profil Desa

Teknik Analisis Data

Pada penelitian kualitatif, pengolahan data tidak harus dilakukan setelah data terkumpul atau pengolahan data selesai. Dalam hal ini data sementara yang terkumpul, data yang sudah ada dapat di olah dan dilakukan analisis data bersamaan. Pada saat analisis data, dapat kembali lagi kelapangan untuk mencari data tambahan yang dianggap perlu untuk mengolahnya kembali pengolahan data pada penelitian ini terdiri dari:

1. Reduksi Data

Mereduksi data artinya merangkum, dan kemudian memilah hal yang pokok memfokuskan pada hal yang penting. Reduksi data akan terus dilakukan secara terus menerus selama penelitian berlangsung, kemudian setelah itu akan di sederhanakan lagi agar nantinya memberikan kemudahan dalam penampilan penyajian, serta untuk menarik kesimpulan sementara.

2. *Data Display* (penyajian data)

Setelah data di reduksi, maka langkah selanjutnya adalah menyajikan dan memilah sesuai dengan tema dan kategori dengan pola dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antara kategori dan sejenisnya. Penelitian kualitatif agar nantinya mempermudah pembaca dan peneliti untuk memahami isi dari hasil penelitian dan merencanakan apa kerja selanjutnya berdasarkan apa yang telah di pahami tersebut.

3. Tahap kesimpulan

Dalam tahap ini hasil dari Reduksi data akan di lakukan analisa data kemudian pada tahap selanjutnya peneliti akan melakukan omparasi data.

4. Tahap verifikasi

Langkah terakhir dari tahap ini adalah menarik kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan dalam penelitian ini dapat di lakukan dengan menjawab rumusan masalah yang di telah rumuskan.

Keabsahan Data

Dalam menentukan keabsahan data peneliti menggunakan teknik triangulasi data. Triangulasi merupakan teknik pemeriksaan keabsahan data dengan memanfaatkan berbagai sumber eksternal data tersebut sebagai bahan perbandingan. Triangulasi yang digunakan oleh peneliti ada tiga yaitu; satu; triangulasi data, yaitu dengan cara perbandingan data hasil pengamatan dengan hasil wawancara, data hasil wawancara dengan dokumentasi, dan data hasil pengamatan dengan dokumentasi. Hasil perbandingan ini diharapkan dapat menyatukan persepsi atas data yang diperoleh.

Hasil Penelitian

Inti dari permasalahan ini adalah mengenai pengelolaan ADD, agar pengelolaanya dapat di tingkatkan atau di seimbangkan di setiap bidang termasuk bidang pemberdayaan.

1. Perencanaan

Jadi untuk penyusunann perencanaanya itu sendiri melalui beberapa tahapan, dari tahapan-tahapan tersebut nantinya akan menghasilkan sebuah rencana atau program yang akan di laksanakan, dan sebelum program tersebut di laksanakan maka akan ada musyawarah yang melibatkan masyarkat.

2. Pelaksanaan

Jadi dapat di ketahui bahwa dalam kegiatan pelaksanaan pembangunan masyarakat di libatkan dan menyerap masyarakat Desa Bangkal itu sendiri, artinya masyarakat itu sendiri di beri kesempatan untuk menyukseskan kegiatan itu sendiri yang nantinya juga pasti akan menjadi kesejahteraan bagi masyarakat itu sendiri.

3. Penatausahaan

Untuk penatausahaan di lakukan oleh bendahara desa, dengan mencatat setiap laporan penerimaan dan pengeluaran serta melakukan tutup buku setiap ahir blan secara tertib dan menyampaikan laoran pertanggung jawaban kepada kepala desa.Sesuai dengan wawancara yang di lakukan kepada bendahara desa bapak doni kamil.

Artinya setiap proses pencataan penerimaan dan pengeluaran bendahara melakukan pencatatan, dan sumuanya tercatata dalam buku kas umum. Agar setiap uang yang keluar di ketahuai untuk apa saja uang tersebut di gunakan.

Penerimaan dan realisasi (ADD) Tahun anggaran 2017

No.	Uraian kegiatan	Penerimaan (Rp)	Pengeluaran (Rp)	Persentase
	Total penerimaan	296.207.800		
1	Bidang		86.769.300	29,3%

	pembangunan			
2	Bidang pemerintahan		194.165.056	65,5%
3	Bidang pemberdayaan		15.273.444	5,2%
	Total pengeluaran		296.207.800	100%

4. Pelaporan

Untuk pelaporannya sendiri pelaporan sekretaris desa menyusun kemudian di sampaikan kepala desa kepada bupati berupa pelaporan semester pertama paling lambat ahir bulan juli tahun berjalan dan laporan smester ahir tahun paling lambat ahir bulan januari, dan utuk pelaporannya sendiri di desa bangkal jarang mengalami keterlambatan, artinya sekretaris desa sudah menyiapkan untuk penyusunan sendiri. bahwa laporan realisasi APBDes di buat oleh bendahara, yang terdiri dari laporan smester pertama yang di sampaikan pada ahir juli, dan laporan smester kedua yaitu akhir Januari.

Pertanggungjawaban

Bahwa untuk pertanggungjawaban itu sendiri mengenai pelaksanaan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDes di Desa Bangkal. Kepala Desa menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDes, dan untuk keterlambatan di desa bangkal sendiri tidak pernah mengalami keterlamabtan karena penyusunannya sendiri di susun setiap rogram realisasi itu selesai, begitupun seterusnya, kemudian barulah kepala desa menyampaikan kepada Bupati/Walikota melalui camat, yang dilaporkan setiap ahir tahun dan paling lambat bulan januari tahun berikutnya.

Pembahasan

1. Perencanaan

Mekanisme tersebut telah sama dengan hasil penelitian yang dilakukan dapatkan di desa bangkal dan ini juga di dukung dengan wawancara bendahara desa bahwa dalam penyusunan RPJMdes dan RkPDes yang

kemudian sekretaris menyampaikan kepada kepala desa dan selanjutnya di bahas bersama dengan BPD, yang kemudian menyelipkan masyarakat. Akan tetapi untuk keterlibatannya sendiri masyarakat tidak semuanya di libatkan artinya masyarakat kurang puas atas musyawarah-musyawarah yang hanya perwakilan saja yang di libatkan, seperti RT, RW hal ini juga di dukung dengan wawancara tokoh masyarakat, jadi untuk hal transparansinya sendiri masyarakat mengatakan bahwasanya hanya perwakilan-perwakilan saja yang hanya di undang mengenai hal transparansi tersebut. Bahkan ketika memasang benner pun masyarakat tidakakan tau jika masyarakat tidak mengunjungi balai. Dari keterangan Kepala Desa di atas dapat di simpulkan bahwa untuk hal transparansi mengenai APBDDes, pemerintah desa mengadakan musyawarah yang melibatkan masyarakat di musyawarah tersebut di sampaikan mengenai RkPDDes dan dana yang masuk ataupun dana yang keluar.

2. Pelaksanaan

Dari hasil penelitian yang di lakukan di Desa Bangkal kecamatan kota, kabupaten Sumenep. Bahwasanya pelaksanaan pengendaliaanya di pegang oleh kepala desa selaku penanggung jawab penuh terhadap keuangan Desa dan di kuasakan kepada perangkat desa sehingga pengelolaannya di lakukan secara bersama-sama. Pedemon pelaksanaan pengelolaan keuangan desa di Desa Bangkal kecamatan kota, kabupaten sumenep. Sudah sesuai dengan permendagri nomor 113 tahun 2014. Bukti yang sah dan lengkap tersebut harus dasar persetujuan dari kepala desa dan bendahara desa.

3. Penatausahaan

Untuk penatausahaanya sendiri di desa bangkal menggunakan kas umum, artinya setiap pengeluaran itu di catat dan di masukkan dalam kas umum desa. Contohnya seperti nota pembelian, kwitansi artinya setiap pembelian hari ini semuanya di catat seperti pembelanjaan desa yang adi di tabel di atas yang merupakan dana yang bersal dari (ADD).

4. Pelaporan

Untuk pelaporannya sendiri di desa banngkal jarang mengalami keterlambatan pelaporan kepada bupati karena dari penjelasan wawancara di atas kepala desa mengatakan , sekretaris desa itu sudah menyusun setiap program yang telah terealisasi , artinya tidak menunggu rampung dulu secara keseluruhan. Baik itu laporan tahap pertama ataupun laporan tahap kedua atau laporan ahir.

5. Pertanggungjawaban

Keuangan desa yang merupakan sumber utama pendapatan desa yang harus di pertanggungjawabkan. Jadi untuk laporan pertanggung jawaban itu sendiri tidak ada masalah baik dari penyusunan maupun keterlambatan semuanya sudah sesuai dengan peraturan yang ada, tanpa mengalami keterlambatan jadi untuk system pengelolaanya sendiri sudah cukup bagus untuk pengelolaan seperti penyusunan laporan pertanggung jawaban tersebut, hingga semuanya telah sesuai dengan aturan yang sudah ada.

Kesimpulan

1. Pengelolaan (ADD) di Desa Bankal Kecamatan Kota, Kabupaten Sumenep. Meliputi tahap perencanaan, pelaksanaan, tahap penatausahaan, tahap pelaporan dan tahap pertanggungjawaban dimana thapan ini di lakukan perangkat desa untuk pengelolaan Alokasi dana desa (ADD)
2. Untuk tahapa perencanaanya sendiri dana yang berasal dari Alokasi Dana Desa (ADD) pengelolaanya sendiri masih lebih banyak di gunakan kepada pembangunan fisik untuk pemberdayaanya sendiri masih kurang, walaupun dana ADD itu memang 70% untuk pembangunan, dan untuk pemberdayaanya sendiri 30% tapi masih kurang maksimal untuk pemberdayaannya sendiri.
3. Untuk APBDes yang dari ADD masyarakat kurang tau dengan adanya ADD, karena masyarakat hanya tau bahwa uang desa berasal dari pemerintah pusat, tetapi tidak tau jenis APBDesnya, apakah dari Alokasi Dana Desa (ADD), atau DD, ataupun jenis APBDes lainnya.

Saran

1. Perlunya ditingkatkan sosialisasi tentang jenis-jenis APBDes agar masyarakat mengetahui program-program yang di hasilkan dari jenis APBDes tersebut.
2. Dan juga perlunya di tingkatkan Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di bidang pemberdayaan masyarakat, agar program-program di bidang pemberdayaan dan pembangunan dapat seimbang. Agar masyarakat juga bisa menuangkan potensinya atau mengasah potensinya agar bisa bermanfaat agar nantinya ketika ada BUMDES pemerintah desa bisa mengetahui masyarakat-masyarakat yang mempunyai potensi untukmenunjang Badan Usaha Milik Desa (BUMDES)
3. Perlunya di adakan BUMDES, KOPRASI agar masyarakat dapat melakukan simpan pinjam baik untuk usaha maupun untukkebutuhan masyarakat sehari-hari.

Daftar Pustaka

- Arra laili marselina, 2018. *Pengelolaan Alokasi Dana Desa dalam Upaya Meningkatkan Pembangunan Ekonomi Masyarakat di Desa Magmagan Karya Kecamatan Lumar*. Fakultas ekonomi dan bisnis universitas tanjungpura. Artikel ilmiah.
- BPKP 2015. *Petunjuk pelaksanaan bimbingan dan konsultasi pengelolaan keuangan desa*. deputi bidang pengawasan dan penyelenggaraan kewenangan daerah.
- Moh sofiyanto, Malavia Mardani Ronny, M agus salim *pengelolaan dana desa dalam upaya meningkatkan pembangunan di desa bannyuates kecamatan banyuates kabupaten sampan*. Universitas islam malang prodi manajemen fakultas ekonomi. Jurnal Riset Manajemen prodi manajemen.
- Nurhakhim irman, yudianto ivan 2018. *Implementation of vilaage fund management in panyirapan village, sukanagara village and soreang village ,soreang sub-dstric bandung regency*. Dapatermen of accounting, faculty of economic and bisnis padjajdaran university.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa.*

